

KBM  
KEMENTERIAN  
KEMASYARAKATAN  
KEMUDAHAAN  
KEMERDEKAAN  
KEMERDEKAAN



# Melintas Perbedaan

Suara Perempuan, Agensi,  
dan Politik Solidaritas

Editor

Rachmi Diyah Larasati • Ratna Noviani

# Melintas Perbedaan

Suara Perempuan, Agensi,  
dan Politik Solidaritas

---



# Melintas Perbedaan

Suara Perempuan, Agensi,  
dan Politik Solidaritas

---

Editor

Rachmi Diah Larasati • Ratna Noviani

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### Lingkup Hak Cipta

##### Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ketentuan Pidana

##### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Jakarta:

KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)



**Melintas Perbedaan:**  
**Suara Perempuan, Agensi, dan Politik Solidaritas**  
© Rachmi Diyah Larasati dan Ratna Noviani

KPG 59 21 01938

Cetakan Pertama, Agustus 2021

**Editor**

Rachmi Diyah Larasati  
Ratna Noviani

**Perancang Sampul & Penata Letak**

Wendie Artswenda

LARASATI, Rachmi Diyah dan Ratna Noviani  
**Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi,  
dan Politik Solidaritas**  
Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2021  
xxix + 311; 15 cm x 23 cm  
ISBN: 978-602-481-623-0  
ISBN Digital: 978-602-481-624-7

**Ilustrasi Sampul**

Astuti Kusumo, "Ibu Bumi", 140 cm x 120 cm; *acrylic on canvas*, 2020

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.  
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR: AGENSI DALAM BENTANG SUARA PEREMPUAN</b>	vii
<i>Rachmi Diyah Larasati dan Ratna Noviani</i>	
<b>BAGIAN I: KEKUASAAN DAN STRUKTUR SOSIAL</b>	1
• <b>Jalan Menuju Utopia: Juliet B. Schor tentang Konsumerisme, Kemakmuran Sejati, dan Gaya Hidup Berkelanjutan</b>	3
<i>Heru Nugroho</i>	
• <b>Nancy Fraser: Menyiasati Perangkap Kapitalisme</b>	31
<i>Sugeng Bayu Wahyono</i>	
• <b>Komunikasi Otentik, Krisis Kepublikan, dan Demokrasi dalam Cara Pandang Hannah Arendt</b>	55
<i>Hermin Indah Wahyuni</i>	
<b>BAGIAN II: SUBJEK, HASRAT, DAN TEKNOLOGI</b>	81
• <b>Cyborg sebagai Manifesto Politik: <i>Subjectivity</i> dalam Pemikiran Donna Haraway</b>	83
<i>Wening Udasmoro</i>	



• <b>Sinema Perempuan dalam Pandangan</b> <b>Teresa de Lauretis</b> <i>Elok Santi Jesica</i>	107
<b>BAGIAN III: TUBUH DAN POLITIK PERBEDAAN</b>	135
• <b>Menjadi Melalui Aksi: Judith Butler</b> <i>Dian Arymami</i>	137
• <b>Merasal Eve Kosofsky Sedgwick untuk</b> <b>Melampaui Politik Identitas</b> <i>Hendri Yulius Wijaya</i>	157
• <b>Bukankah Aku Seorang Perempuan? Saat bell hooks</b> <b>Menggugat Gender, Ras, dan Kelas</b> <i>Dewi Candraningrum</i>	191
<b>BAGIAN IV: AGAMA DAN POLITIK IDENTITAS</b>	215
• <b>Catherine Keller: Melucuti yang Terucap,</b> <b>Menyingkap yang Tak Bernama</b> <i>Leonard Chrysostomos Epafra</i>	217
• <b>Saba Mahmood: Feminisme Non-Liberal</b> <b>dan Kritik atas Sekularisme</b> <i>Zainal Abidin Bagli</i>	243
• <b>Fatima Mernissi: Menembus Batas, Mendobrak</b> <b>Tradisi dan Doktrin Agama Patriarki</b> <i>Inayah Rohmaniyah</i>	265
<b>TENTANG PENULIS DAN EDITOR</b>	291
<b>INDEKS</b>	303

## NANCY FRASER: MENYIASATI PERANGKAP KAPITALISME

Sugeng Bayu Wahyono

**NANCY FRASER** adalah salah seorang teoretikus kritis dan pemikir feminis dari Amerika yang terkemuka. Ia adalah Profesor Filsafat dan Politik di The New School for Social Research, New York. Ia memberi perhatian pada teori sosial dan politik, teori feminis, dan pemikiran kontemporer Jerman dan Prancis. Fraser pernah menerima American Philosophical Association's 2010, Alfred Schutz Prize, dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari National University of Cordoba, Argentina. Ia juga sering memberi kuliah sebagai profesor tamu pada sejumlah universitas ternama di benua Eropa, Asia, dan Afrika. Beberapa karyanya yang sangat berpengaruh antara lain: *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy* (1990), *Unruly Practices: Power, Discourse and Gender In Contemporary Social*





*Theory* (1989), *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (2003), *Feminism, Capitalism and the Cunning of History* yang diterbitkan di *New Left Review* (2009), *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (2013), *Capitalism: A Conversation in Critical Theory* (2018), *Feminism for the 99%: A Manifesto* (2019), dan masih banyak lagi karya lain dalam bentuk artikel yang telah diterbitkan. (Diolah dari berbagai sumber)

Sumber foto:

<https://www.dissentmagazine.org/wp-content/uploads/Fraser-NF-Barcelona-2-1200.jpg>

## Pendahuluan

Tanpa bermaksud seksis, tetapi dalam dunia pemikiran teoretik ilmu sosial, pemikir perempuan memang baru muncul secara semarak pada dekade 1960-an seiring dengan mulai maraknya teori feminis di Barat. Namun demikian, tidaklah benar anggapan bahwa kajian tentang emansipasi perempuan merupakan fenomena pertengahan abad 20, pun demikian, para teoretikus perempuan juga tidak benar jika baru muncul pada masa itu. Jauh sebelum itu di dunia akademik Barat para pemikir perempuan sudah bermunculan, dan bahkan ada yang mengatakan sudah sejak abad 14 (lihat misalnya Simons dan Timmermann, 2015). Tentu sudah bisa diduga bahwa persoalan emansipasi perempuan itu, atau mempertanyakan tentang hak perempuan, berkaitan erat dengan perubahan secara fundamental kehidupan masyarakat Barat dari agraris menjadi masyarakat industrial.

Dengan berubahnya masyarakat Barat menjadi industrial itu, tidak heran jika kemudian Karl Marx dan Engels (1984) dalam *The Origin of the Family, Private Property, and the State* menyinggung tentang isu emansipasi, karena dalam masyarakat industri, perempuan sudah mulai memasuki ranah publik sebagai pekerja di pabrik. Marx terkenal karena pandangannya bahwa masuknya perempuan ke dalam “produksi publik” juga akan membawa mereka ke arah

emansipasi yang bersifat umum. Dalam masyarakat sosialis tertentu sudah diatur pula semacam tempat penitipan dan perawatan anak yang memungkinkan terjadinya hal itu. Sebelumnya juga sudah muncul rintisan teori feminis di Barat, yaitu karya Mary Wollstonecraft, terutama *A Vindication of the Right of Woman* yang terbit pada 1792. Menyusul kemudian beberapa penulis perempuan besar seperti Charlotte Brontë, George Eliot, dan Elizabeth Gaskell, meskipun karyanya berupa buku-buku fiksi (Evans, 2011: 392-394). Di Indonesia meskipun tidak sesesamak di Barat, pada akhir abad 19 juga sudah ada kiprah pemikir besar dari kalangan perempuan, yaitu Kartini. Bahkan dalam pandangan Pramoedya Ananta Toer (2003), Kartini adalah konseptor Indonesia merdeka, sementara Soekarno dan Hatta serta tokoh-tokoh pergerakan lainnya adalah para pelaksana.

Dengan perkembangan sejarah masyarakat industri seperti itu, maka dapat dipahami jika kemudian di Barat pada pertengahan abad 20 lahir pemikir-pemikir besar dari kalangan perempuan, seperti Simone de Beauvoir, Judith Butler, Hannah Arendt, Julia Kristeva, dan Nancy Fraser. Ada juga beberapa pemikir perempuan kulit berwarna seperti Angela Davis, Audre Lorde, atau bell hooks yang fokus pada isu politik rasial dan *politics of labour*. Tulisan ini akan fokus pada Nancy Fraser yang dalam beberapa tahun terakhir karya-karyanya semakin berpengaruh dalam mendudukkan gagasan tentang peran dan hak perempuan dalam kritik feminis atas sistem politik. Sebagai seorang filsuf dan feminis, tentu Fraser terus memperhatikan perkembangan feminisme global; dan sebagai pemikir teori sosial kritis, ia menaruh perhatian besar pada isu ketidakadilan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa proyek intelektual Fraser memang terletak pada upayanya yang terus-menerus memproblematisasi ketidakadilan struktural, yang secara konsisten bersikap kritis terhadap kapitalisme sebagai biang dari semuanya, baik yang terkait dengan konflik kelas maupun identitas lain.

Fraser senantiasa mengingatkan bahwa lonceng bahaya kapitalisme dalam berbagai bentuknya terus berdentang, bukan saja terhadap status dan hak perempuan, tetapi juga pada dunia secara keseluruhan



karena selalu menghadirkan masalah ketidakadilan sosial struktural. Dalam satu artikelnya yang berjudul *Feminism, Capitalism, and the Cunning of History* (2011), ia menyatakan bahwa watak kooptatif kapitalisme juga menasar pada feminisme liberal yang merupakan feminisme arus utama, dan seperti lazimnya kapitalisme, kooptasi itu dilakukan demi mencapai tujuan dan meraih keuntungannya sendiri. Kelicikan kapitalisme seperti itu praktis bersifat menetap dan senantiasa mewarnai sejarah manusia dengan segala kompleksitas permasalahannya.

Ketika mengalami momen krisis yang disebabkan oleh kapitalisme, Fraser selalu menunjukkan ketidaksukaannya pada feminisme liberal yang merupakan arus utama, karena cenderung fokus pada pengakuan (*recognition*), tetapi kurang peduli pada persoalan distribusi sumberdaya. Ia tidak henti-hentinya mengingatkan agar terus hati-hati terhadap kiprah kapitalisme yang terus berubah bentuk, tetapi secara substantif tetap sama. Memang harus diakui bahwa perkembangan kapitalisme beriringan dengan perkembangan feminisme. Jika tidak waspada, menurut Fraser, feminisme akan terlena sementara kapitalisme sudah berkembang lebih cepat, misalnya seperti fenomena neoliberalisme. Kalangan feminis arus utama mengira bahwa sosialisme demokratis—di mana feminisme ada di dalamnya—masih cukup kuat mengimbangi gerak kuasa kapitalisme, padahal faktanya tidak demikian. Sosialisme demokratik itu mengandung masalah, sebagaimana dikatakan oleh Fraser,

Yang justru terjadi adalah krisis demokrasi sosial, yang baru saja akan berkembang, dan kebangkitan neoliberalisme. Ini adalah bentuk kapitalisme yang benar-benar baru, dan kaum feminis—dan tidak hanya feminis tetapi banyak aktor gerakan sosial yang progresif—sangat lambat menyadari hal ini; sederhananya, kami masih melanjutkan agenda yang fokus pada pengakuan tanpa memahami bagaimana ekonomi politik telah berubah. Bukan hanya kami lupa tentang redistribusi, tetapi tanpa disadari—atau setidaknya banyak orang tidak menyadarinya—kami sebenarnya telah menyumbangkan sesuatu yang positif dan penting untuk neoliberalisme. Kami telah memberikannya semacam kharisma dan legitimasi, yang memungkinkannya untuk menggunakan kharisma pembebasan yang emansipatoris sebagai semacam alat legitimasi atau alibi untuk

rezim ekonomi politik baru yang regresif yang sedang diperkenalkan (dalam Schickert, 2018: 6).

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan betapa penting pemikiran Fraser sebagai perangkat analisis kritis yang mampu meraba kiprah dan kuasa ideologi kapitalisme yang begitu lembut dalam bentuknya yang baru, sehingga feminisme liberal secara tidak sadar malah memberikan legitimasi terhadapnya, salah satunya misalnya terhadap neoliberalisme. Ia menganjurkan bahwa dalam menghadapi kapitalisme, feminisme agar terus mencari alternatif baru dengan cara refleksi diri dan koreksi haluan, dengan berpikir besar, berpikir di luar kotak, sehingga mampu melahirkan feminisme baru yang terus mengambil posisi sebagai anti-neoliberal. Fraser tidak henti-hentinya mengingatkan agar feminisme menjadi bagian dari gerakan yang lebih inklusif dan terus mendiskusikan pemikiran feminisme bagi kaum perempuan secara merata.

Sebagai seorang pemikir besar tentang teori feminis yang menggunakan pendekatan dan analisis kritis, tentu pandangan-pandangan yang dikembangkannya dipengaruhi oleh pemikir besar sebelumnya, seperti Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Namun demikian, meskipun merujuk pada karya-karya pemikir besar tersebut, Fraser juga terlibat dalam pergulatan dan perdebatan teoretis dengan pendahulunya itu, dan bahkan sekaligus juga berbeda pendapat. Dengan Habermas, dia terlibat dalam suatu perdebatan tentang konsep ruang publik borjuis, yang ia nilai sebagai ruang publik yang tidak saja terlalu utopis, tetapi juga secara praktis tidak realistis. Evaluasi dan perdebatan Fraser dengan gagasan Habermas tentang ruang publik borjuis ini akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

Sebagai seorang pemikir feminis yang berlatar belakang pendidikan filsafat, Fraser terlibat dalam suatu perenungan epistemologis secara mendalam. Oleh karena itu, ia juga bersinggungan dengan Foucault yang dalam genealoginya antara lain fokus pada tubuh. Bagi Foucault, tubuh senantiasa diukir secara total oleh sejarah, karena tubuh merupakan permukaan bertuliskan peristiwa yang bisa



dilacak oleh bahasa (Foucault, 1998: 375). Oleh karena itu, kartografi kekuasaan, menurut Foucault, adalah menyingkap tubuh yang diukirkan secara total oleh sejarah, sehingga terbongkarlah sistem penindasan yang mematikan subjek. Sebagaimana ia mengatakan,

Tubuh juga terlibat secara langsung di dalam ranah politik; relasi kekuasaan memunculkan cengkeraman langsung terhadapnya; relasi kekuasaan menyemainya, menandainya, melatihnya, menyiksanya, memaksanya melakukan berbagai tugas, melakukan seremoni, mengeluarkan tanda-tanda. Investasi politik tubuh ini terikat, sejalan dengan relasi-relasi timbal-balik yang kompleks, dengan penggunaan ekonominya; sebagian besar sebagai sebuah kekuatan produksi bahwa tubuh dibebani dengan relasi kekuasaan dan dominasi; namun pada sisi lain, penetapannya sebagai kekuatan tenaga kerja hanya mungkin apabila terjebak di dalam sistem penindasan (yang kebutuhannya juga menjadi sistem instrumen politik yang dipersiapkan, dikalkulasi, dan digunakan secara cermat); tubuh menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat apabila menjadi tubuh yang produktif sekaligus sebagai budak (Foucault, 1979: 25-26).

Ketika fokus pada tubuh itulah kemudian gagasan Foucault mengilhami Fraser sebagai filsuf dengan mengatakan bahwa tubuh telah ditinggalkan filsafat. Namun demikian, meskipun Fraser begitu apresiatif terhadap pemikiran Foucault, tetapi juga memberikan catatan kritis, terutama tentang epistemologinya yang gigih dan cermat berporos pada anti-humanis dan anti-subjek. Terhadap epistemologi Foucault itu, Fraser (1989) menyatakan bahwa Foucault mengabaikan sebagian besar bahasanya seperti "sistem penindasan" dan juga "permainan kekuasaan" yang diulang-ulang tiada henti; hal itu sendiri merupakan bahasa yang berciri modernis dan humanis (Scheurich dan McKenzie dalam Denzin dan Lincoln, 2011: 238).

Fraser juga terlibat dalam perdebatan dengan teman-temannya sesama pemikir perspektif feminis. Dengan Axel Honneth misalnya, dia terlibat perdebatan secara konseptual tentang isu ketidakadilan yang gagasannya dituangkan dalam karya bertajuk *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (2003). Dengan teoretikus feminis yang sangat berpengaruh, Judith Butler, Fraser juga melontarkan kritik, bahwa Butler mengabaikan dunia

yang bersifat material. Bagi Fraser sebagaimana dituangkan dalam karyanya *Heterosexual Capitalism?* (1998), pergeseran-pergeseran identitas gender dalam kapitalisme sangat bisa diterima dan mungkin terjadi, tetapi tidak melakukan upaya apa pun untuk menantang tatanan yang mendasari dunia itu (Evans, 2011: 406).

Begitulah, Nancy Fraser merupakan salah satu pemikir besar perempuan yang pergulatan pemikirannya bertautan dengan para pemikir besar lainnya baik dari kalangan filsafat, sosiologi, politik, dan tentu saja teori feminis itu sendiri. Pilihan pendekatan terbuka terhadap teori feminis yang ia lakukan tentu berimplikasi pada pemikirannya yang lebih diskursif, sehingga Fraser tidak bisa dikategorikan secara tetap apakah ia seorang pemikir teori feminis radikal misalnya, meskipun ada pula yang memasukkannya dalam kategori pemikir feminis sosialis dan pascamodernis. Posisi teoretiknya yang dinamis seperti itu menjadi relevan dan signifikan dengan Kajian Budaya dan Media yang merupakan salah satu pendekatan dan analisis kritis yang bersifat multidisiplin. Akan tetapi mengingat begitu luas cakupan dan ruang lingkup pemikiran Fraser dan juga pertimbangan keterbatasan ruang, maka tulisan ini akan lebih fokus pada gagasannya tentang perlunya memikirkan kembali konsep ruang publik yang mempertanyakan soal pengabaian ketimpangan sosial, eksklusivitas-inklusivitas ruang publik, dan kontra publik subaltern. Tulisan ini juga akan menyinggung pandangan Fraser tentang kelas dan identitas yang semuanya berangkat dari kegelisahannya tentang isu ketidakadilan struktural dan implikasinya terhadap posisi perempuan.

### Memikirkan Kembali Konsep Ruang Publik

Pada dekade 1980-an, diskusi tentang ruang publik sebagaimana yang digagas oleh Habermas sangat marak dalam dunia akademik, dan tentu saja mengundang perdebatan dari berbagai kalangan, bahkan juga dari kalangan pemikir teori sosial kritis itu sendiri. Dipicu oleh masih adanya keterbatasan teorisasi tentang demokrasi pada era kapitalisme akhir, Fraser memandang perlu untuk berangkat dari konsep



ruang publik yang dikemukakan Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989). Setelah melakukan pembacaan secara cermat terhadap konsepsi ruang publik Habermas, ia memberikan evaluasi kritis dan kemudian menganjurkan agar ada *rethinking* atas konsepsi ruang publik gagasan Habermas itu.

Sebagaimana dikatakan Fraser, gagasan ruang publik Habermas adalah sumber konseptual yang dapat membantu mengatasi berbagai problem demokrasi. Ruang publik dirancang sebagai panggung dalam masyarakat modern, di mana partisipasi politik dilaksanakan melalui media bicara. Itu adalah ruang di mana warga menyampaikan hal-hal yang menjadi urusan bersama. Oleh karena itu, ruang publik merupakan arena terlembagakan dari interaksi diskursif. Arena ini secara konseptual berbeda dari negara; itu sebuah situs untuk produksi dan sirkulasi wacana yang pada prinsipnya dapat digunakan untuk mengkritik negara. Ruang publik dalam pandangan Habermas secara konseptual juga berbeda dari arena ekonomi resmi; dalam arti bukan hubungan-hubungan pasar, melainkan lebih merupakan relasi diskursif, sebuah panggung untuk debat dan menyampaikan berbagai gagasan daripada sekadar untuk menjual dan membeli. Dengan demikian, konsep ruang publik ini mempersilakan untuk tetap menjaga pandangan berbeda antara aparaturnya negara, ekonomi pasar, serta asosiasi-asosiasi demokrasi, dan perbedaan itulah yang merupakan esensi teori demokrasi (Fraser, 1990: 57).

Dalam upayanya mengembangkan demokrasi deliberatif, Habermas mencoba mencari lokus yang tepat pada arena publik. Ia memulainya dengan membedakan antara publik dan privat. Ranah privat bersifat tertutup, sedangkan ranah publik bersifat terbuka untuk semua warga. Dalam mengembangkan konsepnya itu, Habermas mengacu pada perkembangan historis masyarakat industri Eropa, yaitu lingkup publik kaum borjuis pada abad 18. Ruang publik itu merupakan arena pertama bagi semua aktivitas komunikasi, dan kemudian berpotensi ke arah pembentukan opini publik. Ruang publik ini, menurut Habermas, berbeda dengan ruang politik yang diciptakan negara, dan juga bukan ruang ekonomi pasar tempat jual beli berbagai komoditas ekonomi.

Gagasan ruang publik itu kemudian juga dieksplorasi lagi oleh Habermas (1998) dalam karyanya *Between Fact and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Menurutnya, lingkup publik yang kuat tergantung pada dua hal yaitu, *pertama*, privasi dan lingkup pribadi yang kuat; *kedua*, pada masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat pula. Masyarakat sipil “[t]erdiri dari asosiasi-asosiasi sukarela dan hubungan-hubungan non-pemerintah dan non-ekonomi yang melandasi struktur komunikasi lingkup publik” (Habermas, 1996: 366). Lebih lanjut Habermas menjelaskan:

*Civil society* yang terbentuk dari asosiasi, organisasi, dan gerakan yang kurang lebih muncul secara spontan itu, selaras dengan bagaimana problem kemasyarakatan bergema dalam lingkup kehidupan pribadi, menyaring dan mengirimkan reaksi-reaksi seperti itu dalam bentuk yang diperkuat pada lingkup publik. Inti dari masyarakat sipil terdiri dari jaringan asosiasi yang melembagakan wacana pemecahan masalah tentang problem-problem kepentingan umum dalam kerangka lingkup publik terorganisir (Habermas, 1996: 367).

Bagi Habermas (1989), ruang publik adalah satu wilayah yang muncul pada ruang spesifik dalam masyarakat borjuis. Ruang publik adalah ruang yang memperantarai masyarakat sipil dengan negara, di mana publik mengorganisasi dirinya sendiri, dan di mana opini publik dibangun. Di dalam ruang ini individu mampu mengembangkan dirinya sendiri dan terlibat dalam debat tentang arah dan tujuan masyarakat. Habermas kemudian mendokumentasikan apa yang dia lihat sebagai kemunduran ruang publik akibat perkembangan kapitalisme yang mengarah kepada monopoli dan penguatan negara (Barker, 2000: 362).

Dalam evaluasinya terhadap gagasan Habermas tentang ruang publik, Fraser terutama menyoroti persoalan ruang publik borjuis yang eksklusif, dan ketidakmungkinan menjadi inklusif jika tidak memperhitungkan ketimpangan sosial struktural yang sudah cukup mapan dalam suatu masyarakat. Kritik Fraser tentang kondisi yang memungkinkan ruang publik, sebagaimana ditunjukkan pada masyarakat kapitalis akhir, terutama neoliberalisme, dapat diformulasikan dengan pertanyaan sederhana: apakah situasi masyarakat industri



bermoda produksi kapitalisme neoliberalistik seperti sekarang ini memungkinkan keberadaan dan penyelenggaraan ruang publik secara substantif? Jawabannya relatif sederhana, sepanjang persyaratan dasarnya, yaitu penghilangan ketimpangan sosial dan transformasi sosial ekonomi sudah dipenuhi, maka ruang publik secara substantif itu benar adanya. Sebaliknya, jika syarat dasar itu tidak dipenuhi, maka ruang publik secara substantif tidak ada, yang ada hanyalah ruang publik formalistik yang dikontrol oleh kelompok dominatif dan hegemonik berwatak kapitalistik.

Fraser tidak ragu-ragu menilai bahwa gagasan ruang publik Habermas terlalu ideal dan bahkan terlalu utopis, bukan saja secara empirik tetapi juga secara teoretik. Dari aspek empirik, Habermas melupakan persoalan akses bagi setiap kelompok yang secara faktual terbukti tidak sama peluangnya untuk ikut terlibat dalam diskusi. Fraser menekankan pentingnya suatu analisis terhadap “kondisi kemungkinan” (*condition of possibility*) dari eksistensi publik. Bahwa pengakuan akan adanya pluralitas saja tidaklah cukup, lebih dari itu, menurut Fraser: “Kita juga perlu secara serius meragukan konsep ruang publik yang nyata-nyata dimaksudkan untuk menutup-nutupi, sekaligus menghilangkan, adanya ketimpangan sosial (Fraser, 1990: 65). Sikap skeptik Fraser terhadap ruang publik itu tentu terkait erat dengan aspek teoretik yang ingin dibangun, dan sekaligus anjuran perlunya memikirkan kembali (*rethinking*) konsep Habermas tentang ruang publik dalam masyarakat industri bermoda produksi kapitalisme neoliberalistik. Bagi Fraser formulasi teoretik tentang ruang publik harus memperhitungkan adanya prasyarat yang harus dipenuhi lebih dahulu, yaitu apakah ruang publik itu sudah *accessible* bagi semua kelompok yang ada dalam masyarakat.

Fraser berpendapat bahwa perhatian penuh terhadap ketimpangan sosial dan juga alih-ubah menuju persamaan sosial-ekonomi adalah syarat untuk terciptanya partisipasi sepadan secara nyata, yaitu sebuah manifestasi ruang publik di mana semua orang dapat berpartisipasi secara bersama-sama tanpa pandang bulu. Situasi dan kondisi susana partisipatif seperti itu hanya dapat diwujudkan melalui “pengaturan kembali ekonomi yang diatur secara politis”,

karena masyarakat egaliter secara sosial-ekonomi tidak mungkin tercapai dalam sistem kapitalisme, terutama yang berbasis pasar bebas (Fraser, 1990: 65, 74). Jadi, Fraser ingin menunjukkan bahwa menteorisasikan ruang publik sebagai arena partisipasi yang sepadan dalam suatu masyarakat industri bermoda produksi kapitalisme neoliberalistik adalah sebuah kemustahilan.

Fraser menunjukkan kegiatannya dalam mengkritik, bukan saja terhadap kapitalisme tetapi juga terhadap feminisme liberal, terutama dalam aspek epistemologinya. Bagi Fraser ada semacam kekeliruan konseptual yang dilakukan oleh feminis liberal dalam memahami konsep kunci seperti kesetaraan. Kekeliruan itu terletak pada gagasan kesetaraan dari feminisme liberal yang terlalu meritokratis, yang berisiko memandang perempuan secara individual dan bukan sebagai entitas struktural. Akibatnya persoalan kesetaraan hanya direduksi pada isu diskriminasi terhadap perempuan, dan membandingkannya dengan peluang dan kesempatan yang diperoleh laki-laki. Persoalan kesetaraan, oleh karenanya, merupakan persoalan menghilangkan hambatan diskriminasi itu. Namun, dorongan kesetaraan itu hanya terjadi dalam lingkup kelas mereka sendiri, yaitu setara dengan laki-laki kulit putih heteroseksual dari kelas mereka sendiri. Menurut Fraser, persoalannya pada dasarnya lebih bersifat struktural, menyangkut kelas dalam arti keseluruhan, sebagaimana ia katakan sebagai berikut:

Arti feminisme bagi saya adalah gagasan kesetaraan yang lebih kuat dan radikal yang benar-benar tidak mendiversifikasi hierarki seksual, tetapi menghapusnya—atau setidaknya-tidaknya sangat menguranginya. Jadi ide persamaan meritokrasi ini tidak akan benar-benar saya sebut sebagai kesetaraan. Meritokrasi liberal sebagai suatu interpretasi kesetaraan telah membawa beberapa keuntungan nyata tetapi hanya untuk suatu lapisan sangat tipis dari para perempuan. Mayoritas utama kaum perempuan tidak memecahkan langit-langit kaca [batas-batas yang selama ini tak dapat ditembus]; mereka terjebak di ruang bawah tanah, mereka [harus] membersihkan dan menyapu pecahan kaca. Saya adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan sejenis feminisme alternatif terhadap feminisme liberal meritokratis ini (dalam Schickel, 2018: 6).



Memperhatikan pernyataan tersebut, Fraser selangkah lebih maju daripada feminis liberal tentang gagasan kesetaraan yang ditempatkannya sebagai problem struktural, bukan sebagai problem individual. Selain itu, gagasan Fraser tentang kesetaraan telah melampaui gagasan feminis liberal yang meritokratik, dengan menawarkan feminisme alternatif yang berpotensi menjadi pendekatan dan perangkat analisis baru terhadap problem kesetaraan gender kaum perempuan sebagai entitas struktural.

### **Eksklusivitas Ruang Publik**

Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Habermas (1992), ruang publik merupakan arena bertemunya individu dan kelompok privat (bukan birokrat atau pejabat negara) yang berkomitmen mendiskusikan berbagai persoalan publik yang mengandung kepentingan bersama. Oleh karena ruang publik itu terjadi pada era negara absolut dalam sejarah Eropa modern, tentu saja yang berpartisipasi dalam ruang publik tersebut adalah kalangan borjuis yang kontra terhadap bentuk negara absolut. Ruang publik ini dimaksudkan sebagai mediator antara masyarakat dan negara, yang mengidealkan fungsi negara yang transparan dan terbuka untuk semua orang sehingga aktivitas negara senantiasa berada dalam pengawasan kritis oleh publik. Namun dalam fase perkembangan selanjutnya, ruang publik lebih merupakan wahana bagi ekspresi dan artikulasi kepentingan kaum borjuis terhadap negara yang dijamin secara konstitusional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan juga melalui parlemen. Habermas mengidealkan terjadinya diskusi dalam ruang publik yang bisa diakses oleh semua orang. Diskusi berlangsung secara partisipatif dengan tidak mengakui kepentingan pribadi, mengaburkan ketidaksetaraan status, dan semua berpartisipasi sebagai partisipan secara setara. Dalam proses diskusi egalitarian seperti itu maka lahirlah opini publik yang merupakan konsensus bersama tentang kepentingan bersama (*common good*).

Terhadap konsepsi Habermas tentang ruang publik seperti itu, Fraser dalam hal tertentu setuju, seperti misalnya adanya klaim

aksesibilitas dan publisitas, tetapi ia juga memberikan catatan kritis. Dalam tulisannya *Rethinking the Public Sphere*, Fraser (1990) menawarkan revisi feminis atas deskripsi historis Habermas tentang ruang publik, dan menawarkan gagasan tentang "historiografi revisionis terkini". Menurut Fraser gagasan Habermas terlalu mengidealkan bentuk ruang publik liberal yang lebih merupakan wahana artikulasi kepentingan kaum borjuis. Bentuk ruang publik seperti itu mengabaikan bentuk-bentuk ruang publik lain yang non-liberal dan non-borjuis.

Ruang publik seperti itu, meskipun sudah mengandung demokratisasi, tetapi menurut Fraser senantiasa dibangun oleh sejumlah bentuk eksklusi, peminggiran, dan penyingkiran. Dengan demikian, ruang publik seperti itu, menurut Fraser, tentu akan mengeksklusi perempuan, kalangan buruh, kelompok minoritas, dan komunitas etnis untuk mendapatkan akses pada kepentingan bersama. Dia mengacu pada sarjana lain seperti Mary P. Ryan (1990) dan Geoff Eley (1987), ketika mengatakan bahwa ruang publik borjuis sebenarnya dibentuk oleh "sejumlah pengecualian yang signifikan". Salah satu isu yang ia tekankan, dalam hal ini, adalah tentang eksklusivitas ruang publik terhadap kelompok terpinggirkan, termasuk eksklusi gender yang berkaitan dengan kelas.

Berbeda dengan pernyataan Habermas yang kurang memperhatikan perbedaan status dan inklusivitas dalam ruang publik, Fraser mengklaim bahwa ruang publik borjuis mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok lain yang secara historis terpinggirkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa konsepsi ruang publik borjuis bukan saja terlalu utopis dan idealistik, tetapi sekaligus juga merupakan ideologi maskulin yang melegitimasi berbagai formasi kelas. Aspek kelas ini, menurut Fraser, tidak harus dipisahkan ketika mendekati dan menganalisis berbagai masalah feminisme.

Dalam pandangan Fraser, konsepsi ruang publik Habermas itu mengandung bias kepentingan borjuis, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan Habermas itu bersifat tunggal, monolitik, dan eksklusif. Oleh karena itu, upaya Fraser untuk memikirkan ulang konsepsi ruang publik Habermas juga bisa dibaca sebagai kegelisahannya yang



konsisten terhadap beroperasinya kuasa ideologi kapitalisme liberal dan neoliberal dalam ruang publik. Ini sekaligus menegaskan bahwa Fraser memang senantiasa gigih dalam mengkritik kapitalisme yang menjadi penyebab utama masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial struktural. Bagi Fraser, pertanyaan tentang bagaimana perempuan mengalami diskriminasi, bukanlah perkara perbedaan gender, ketidaksetaraan gender, atau penindasan gender saja. Akan tetapi lebih merupakan persoalan penindasan struktural oleh kapitalisme dalam berbagai bentuknya, yang dialami bukan saja perempuan tetapi juga laki-laki jelata dalam lokasi sistem sosial yang eksploitatif.

Fraser juga kurang setuju dengan gagasan yang selama ini cukup santer digunakan dalam analisis sosial, yang menganggap telah terjadi pergeseran dari isu kelas menjadi isu identitas. Bagi dia, pembedaan kelas dan identitas itu adalah kesia-siaan karena gerakan sosial, terutama gerakan feminis, senantiasa memiliki basis kelas dan sekaligus identitas. Jadi ia sangat tidak setuju jika gerakan feminisme hanya merupakan gerakan identitas, sebagaimana ia katakan sebagai berikut:

Gerakan berbasis kelas memiliki dua aspek. Mereka memiliki aspek struktural yang saya coba teorisasikan dalam hal distribusi walaupun ada cara lain untuk menjelaskannya, dan mereka selalu memiliki aspek identitas dalam pengertian bahwa semua perjuangan kelas, bahkan ketika mereka tidak secara eksplisit fokus pada hal ini, menyampaikan suatu citra mengenai perjuangan tentang siapakah mereka itu—baik menguntungkan atau merugikan. Menurut saya, feminisme tidak ada bedanya; subordinasi perempuan dalam masyarakat kapitalis sama tersudutnya secara struktural seperti eksploitasi kelas. Jadi, saya merasa kesal ketika orang mengatakan bahwa feminisme adalah gerakan identitas, dan hal lain ini adalah gerakan kelas” (dalam Schickert, 2018: 7).

Penegasan Fraser tersebut mengindikasikan bahwa ia menawarkan pendekatan dan analisis kritis terhadap persoalan subordinasi perempuan yang tidak deterministik, dalam arti, hanya ditentukan oleh isu kelas atau isu identitas. Fraser lebih menekankan bahwa feminisme adalah gerakan struktural yang mengandung aspek kelas

dan identitas dalam melawan berbagai bentuk penindasan struktural pada masyarakat industri bermoda produksi kapitalisme liberalistik.

### Aksesibilitas Ruang Publik

Fraser juga mempertanyakan apakah gagasan Habermas tentang ruang publik benar-benar membuka akses, partisipasi sepadan, dan kesamaan sosial? Menurut Fraser, gagasan Habermas tentang ruang publik borjuis sesungguhnya menekankan pada klaim sebagai ruang yang terbuka dan menawarkan aksesibilitas untuk semua. Dengan demikian, ide akses terbuka atau ruang publik inklusif ini sebenarnya sudah mengandung makna bahwa setiap publik apa pun latar belakangnya dapat berpartisipasi. Akan tetapi tentu saja, kita tahu, bahwa klaim ruang publik borjuis untuk membuka akses penuh tersebut dalam kenyataannya tidaklah realistis. Perempuan dari semua etnis dan kelas telah dieksklusi dari partisipasi politik resmi, tepat pada basis asal status gendernya. Sama halnya dengan laki-laki jelata yang telah secara formal dieksklusi oleh struktur politik kepartaian resmi, meskipun sering menjadi basis konstituen partai tersebut. Lebih jauh, dalam banyak kasus, perempuan dan laki-laki dari berbagai ras, etnis, dan kelas telah dieksklusi oleh sistem sosial dominatif yang menjadi arena bekerjanya kuasa ideologi kapitalis.

Menurut Fraser, pertanyaan tentang akses terbuka tidak dapat direduksi tanpa mengingatkan adanya masalah yang terkait dengan hadir dan ketidakhadiran eksklusi-eksklusi formal. Hal itu penting agar kita melihat juga proses interaksi diskursif dalam inklusi formal yang terjadi dalam arena publik. Di sini, kita ingat kembali bahwa konsepsi ruang publik borjuis membutuhkan pengurangan (*bracketing*) terhadap ketidaksetaraan status. Ruang publik seperti itu merupakan arena, di mana mitra bicara seolah-olah akan menyingkirkan sekat-sekat perbedaan ketimpangan sosial-ekonomi, ketika mendiskusikan persoalan bersama. Frasa operatif di sini adalah “seolah-olah”. Akan tetapi pada kenyataannya, ketimpangan sosial antarmitra bicara tidaklah disingkirkan, tetapi hanya sekadar dikurung atau sekadar dilupakan sementara (Fraser, 1990: 63).



Argumen Fraser itu menegaskan kembali bahwa gambaran ideal tentang ruang publik borjuis yang menawarkan akses yang terbuka, partisipasi yang sepadan, dan kesetaraan sosial dinilai terlalu ideal, serta dalam praktiknya kurang realistis. Ruang publik seperti itu dapat dibayangkan hanya sekadar formalistik, yang di dalamnya terdiri dari berbagai elemen warga masyarakat, tetapi dalam praktiknya, debat publik dalam arti yang sesungguhnya sukar terjadi. Adanya ketimpangan sosial di antara mereka yang terlibat dalam debat publik tentang masalah-masalah bersama, pada akhirnya tidak bisa dihindarkan. Ketimpangan sosial tetap ada, tidak bisa dinetralisir dan dikaburkan di dalam ruang publik. Dalam konsepsi Habermas, ketimpangan sosial hanya sekadar dikurung, bukan benar-benar dihilangkan. Fraser mengacu pada penelitian Jane Mansbridge (1990), yang mencatat beberapa cara yang relevan, di mana musyawarah dapat berfungsi sebagai topeng untuk dominasi. Ia berpendapat bahwa “[p]engurangan seperti itu biasanya menguntungkan kelompok dominan dalam masyarakat dan merugikan bawahan” (Mansbridge, 1990: 127).

Dalam konteks masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, apa yang disampaikan Fraser tentang ruang publik yang eksklusif dan rendah aksesibilitasnya tersebut juga terjadi. Sebagai ilustrasi forum komunikasi tradisional kampung, di Yogyakarta misalnya, ada forum *Selasa Kliwonan*, *Setu Pahingan*<sup>6</sup> dan sejenisnya yang merupakan ruang publik karena dibentuk oleh warga, bukan oleh negara, atau pun asosiasi ekonomi. Forum ini biasanya dihadiri oleh seluruh warga kampung dalam berbagai tingkatan status dan atribut sosial yang membicarakan berbagai persoalan bersama tentang berbagai isu pembangunan kampung maupun isu politik

pemerintahan. Sering kali forum seperti itu juga didominasi oleh warga elite kampung yang sudah dituakan oleh warga dan bahkan dipandang sebagai tokoh masyarakat. Sementara warga yang dikonstruksikan sebagai orang biasa, tetap jarang menyampaikan pendapat dan terlibat dalam perdebatan publik. Kebanyakan hanya *manut* (menuruti saja) dan mengiyakan begitu saja apa pun yang disampaikan dan dikehendaki oleh para tokoh kampung. Ruang publik seperti itu juga bukan saja tidak dihadiri oleh warga perempuan, tetapi memang sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa ruang publik kampung memang tidak mengundang warga perempuan. Akan tetapi sering kali forum itu dianggap sebagai ruang deliberatif, padahal sesungguhnya, sebagaimana dikatakan Fraser, ketimpangan sosial antarmitra bicara yang diklaim sebagai telah lebur dan menjadi *egaliter* itu hanya seolah-olah *egaliter* saja. Ketimpangan sosial hanya sekadar mengalami pengurangan, dan tidak dihilangkan, bahkan secara sengaja mengeksklusi perempuan.

Ketika ruang publik kampung itu sudah sejak awal tidak mengundang perempuan, hal itu tentu saja bukanlah sebuah kebetulan. Namun, hal itu merupakan akibat dari wacana yang sudah ada sebelumnya, yaitu kesepakatan ruang publik patriarkal bahwa perempuan tidak perlu diundang. Jadi, wacana di sini menghasilkan subjek, bukan sebaliknya, subjek memproduksi wacana. Namun demikian, Judith Butler (1993) mengingatkan agar berhati-hati terhadap konstruktivisme yang seakan-akan wacana telah membuat subjek terbebaskan, tetapi sebenarnya masih merupakan subjek tetap dan baku, yaitu subjek yang sudah tergenderkan, belum membentuk subjek yang selalu dalam proses menjadi (Edkins dan Williams, 2009: 156). Jadi, tidak diundangnya perempuan merupakan implikasi dari wacana yang menghasilkan subjek yang tergenderkan. Pada akhirnya, itu menjadi sebuah kategori tetap yang diterima begitu saja, tidak saja oleh kaum laki-laki, tetapi juga oleh kaum perempuan di kampung tersebut.

Perangkat analisis kritis Fraser yang mampu menangkap adanya nuansa eksklusi secara halus dalam sebuah ruang publik sehingga terbongkar adanya frasa operatif ‘seolah-olah’ terasa inklusif, dapat

6 Dalam masyarakat Jawa terdapat forum komunikasi sosial yang mendekati karakter ruang publik, karena dibentuk oleh warga, bukan oleh pemerintah atau merupakan asosiasi ekonomi. Kebanyakan forum komunikasi warga tersebut diberi nama yang merujuk pada kombinasi penanggalan internasional dan lokal yang periode waktu pertemuannya 35 hari sekali. Selasa merupakan nama hari penanggalan nasional, sedangkan kliwon merupakan nama hari penanggalan Jawa. Sementara juga banyak forum komunikasi sosial yang dibentuk negara seperti RT-RW, Musrenbang, Dasa Wisma, PKK, Karang Taruna, dll.



menunjukkan bahwa proses demokrasi tidak terjadi. Dengan demikian, klaim adanya demokrasi deliberatif dalam ruang publik menjadi batal secara empirik, karena mengabaikan adanya ketimpangan sosial struktural yang begitu mapan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Fraser (1990) dalam *Rethinking the Public Sphere*, “Kita juga perlu secara serius meragukan konsep ruang publik yang nyata-nyata dimaksudkan untuk menutup-nutupi, sekaligus mengabaikan adanya ketimpangan sosial.”

Begitulah, Fraser menyediakan pendekatan dan analisis kritis canggih yang mampu melakukan perabaan secara halus, sehingga dapat membongkar praktik kuasa ideologis yang dominatif dan hegemomik, serta mampu menyingkap topeng inklusif dalam ruang publik. Dikatakan sebagai perangkat analisis kritis canggih karena mampu menunjukkan teori dan praktik yang sebelumnya diduga inklusif, tetapi sesungguhnya eksklusif sebagaimana yang ia tunjukkan ketika mengevaluasi dan mengkritik gagasan Habermas tentang ruang publik borjuis. Sepintas ruang publik Habermas tampak membebaskan, tetapi sesungguhnya masih mengandung muatan belenggu. Ini sangat penting, karena dalam banyak kasus di Indonesia, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, juga media publik, asosiasi-asosiasi *volunteer* yang merupakan ruang publik yang mengklaim diri sebagai arena penerapan demokrasi deliberatif, akan tetapi jika dianalisis secara cermat masih mengandung eksklusif.

Fraser menawarkan suatu ruang publik baru yang tidak hanya memungkinkan kelas bawah menceritakan kehidupan dan pengalaman mereka, namun juga membangun satu teori sosial kritis berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari narasi-narasi itu. Tidaklah cukup bagi kelas bawah untuk meraih suara, tetapi mereka harus datang untuk ikut mengontrol wacana, budaya, dan kekuasaan. Fraser membuat argumen yang sangat rapi dalam tulisannya *Unruly Practices* (1989), di mana dia menyempurnakan versi teori kritis feminis pascamodern (Agger, 2006: 151).

Satu alternatif yang ditawarkan oleh Fraser sebagai bagian dari pemikiran ulang (*rethinking*) konsep ruang publik dalam masyarakat yang terstratifikasi sebagaimana gagasan Habermas, adalah perlunya

memperhitungkan kontra publik subaltern. Kontra publik itu muncul sebagai respons terhadap praktik eksklusif yang dilakukan oleh publik dominan. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam kontra publik subaltern ikut membantu memperluas ruang diskursif. Proliferasi kontra publik subaltern berarti memperluas kontestasi diskursif, dan itu merupakan hal yang baik dalam masyarakat yang terstratifikasi.

Dalam masyarakat yang terstratifikasi, menurut Fraser (1990), kontra publik subaltern memiliki karakter ganda. Di satu sisi, mereka berfungsi sebagai ruang penarikan dan pengelompokan kembali, dan di sisi yang lain, mereka juga berfungsi sebagai basis latihan untuk aktivitas agitatif yang diarahkan pada publik yang lebih luas. Dialektika antara dua fungsi tersebut menjadi arena potensial bagi emansipasi. Dialektika itu membuka peluang bagi kontra publik subaltern untuk mengimbangi dan untuk menghilangkan—meskipun tidak sepenuhnya—adanya hak istimewa dan partisipasi tidak adil yang dinikmati oleh kelompok sosial dominan dalam masyarakat yang terstratifikasi.

Sementara itu, Fraser juga mempersoalkan publik jamak dan publik tunggal dalam masyarakat multikultural dan egalitarian. Masyarakat egalitarian yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang tidak terstratifikasi, yaitu masyarakat yang kerangka dasarnya bukan kelompok ketimpangan sosial dalam hubungan-hubungan struktural antara kelompok dominan dan subordinat. Masyarakat egalitarian, oleh karena itu, merupakan masyarakat kelas tanpa pembagian kerja berdasarkan gender dan ras. Akan tetapi, mereka tidak perlu menjadi homogen secara kultural. Sebaliknya, masyarakat egalitarian adalah sebuah masyarakat dan asosiasi yang memberi peluang untuk bebas berekspresi, memungkinkan untuk dihuni oleh berbagai kelompok yang memiliki beragam nilai, identitas, gaya budaya, sehingga menjadi masyarakat multikultural. Fraser mengajukan pertanyaan, dalam kondisi multikultural atau dalam situasi tidak adanya ketimpangan struktural, apakah ruang publik komprehensif akan lebih disukai oleh publik beragam?

Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut Fraser, kita perlu melihat lebih dekat hubungan antara wacana publik dan identitas



sosial. Dalam konsepsi borjuis, ruang publik bukan hanya arena bagi formasi opini diskursif. Selain itu, mereka juga merupakan arena bagi pembentukan dan pengaturan identitas sosial. Itu berarti partisipasi bukan hanya sekadar persoalan untuk dapat menyatakan isi hati secara proporsional, netral, dan menghargai bentuk ekspresi. Sebaliknya, sebagaimana ia tegaskan berulang kali, bahwa partisipasi berarti dapat berbicara “dengan suaranya sendiri”, dikonstruksi secara simultan, dan merupakan ekspresi identitas kultural seseorang melalui idiom dan gaya mereka sendiri.

### Penutup

Pandangan kritis Nancy Fraser atas gagasan ruang publik Habermas dari perspektif historiografi revisionis kontemporer menganjurkan perlunya pemikiran ulang atas konsepsi ruang publik Jürgen Habermas yang mengabaikan ketimpangan sosial struktural. Perlu dilakukan suatu reformulasi ruang publik pascaborjuis, sehingga terjadi situasi kewacanaan secara diskursif, tanpa adanya dominasi, hegemoni, dan topeng yang menyelubungi ketimpangan sosial. Ide dasarnya tetap mengacu pada premis dasar bahwa ide Habermas tentang ruang publik sangat diperlukan bagi teori sosial kritis dan untuk praktik-praktik politik. Fraser berasumsi bahwa, tak akan ada upaya yang berhasil untuk memahami keterbatasan-keterbatasan demokrasi kapitalisme akhir seperti kondisinya sekarang ini, tanpa suatu cara atau penggunaan model alternatif demokrasi deliberatif dalam arti yang substansial.

Apa implikasi diskusi ini bagi teori kritis tentang ruang publik dalam masyarakat demokrasi substansial? Secara ringkas, menurut Fraser, kita membutuhkan sosiologi politik kritis mengenai bentuk-bentuk kehidupan publik yang begitu beragam, namun ada fakta ketidaksetaraan dalam partisipasi publik. Hal ini membutuhkan teorisasi tentang interaksi kontestatif dalam publik yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasi mekanisme beroperasinya kuasa ideologi kapitalisme yang menjadikan beberapa pihak di antaranya tersubordinasi pada pihak lainnya.

Apa kesimpulan yang bisa ditarik dari adanya konflik interpretasi historis? Akankah kita berkesimpulan bahwa ada banyak konsep tentang ruang publik yang merupakan seperangkat ideologi maskulin borjuis, sehingga kita setuju bahwa hingga fase perkembangannya sekarang tidak benar-benar ada pandangan kritis terhadap adanya keterbatasan demokrasi liberal? Atau, kita bisa menyimpulkan, bahwa ruang publik telah menjadi ide bagus yang sayangnya telah menjadi tidak realistis dalam praktiknya, namun berpotensi mempertahankan sebuah kekuatan emansipatoris? Pada dasarnya, ide ruang publik merupakan instrumen dominasi atau gagasan ideal yang utopis?

Atas dasar sederet pertanyaan itu, Fraser menyimpulkan bahwa konsepsi ruang publik borjuis, sebagaimana digagas oleh Habermas, tidak memadai sebagai kritik terhadap masyarakat demokrasi kapitalis akhir yang terjadi sekarang ini. Dalam hal ini, argumen Fraser menggarisbawahi bahwa konsepsi borjuis tentang demokrasi bersifat normatif dan terlalu ideal. *Pertama*, ia menunjukkan bahwa konsepsi tidak memadai tentang ruang publik ternyata bukan saja mengurung, tetapi juga mengeliminasi ketimpangan sosial. *Kedua*, ia telah menunjukkan bahwa multiplisitas ruang publik lebih baik daripada ruang publik tunggal, baik dalam masyarakat yang terstratifikasi maupun masyarakat egaliter. *Ketiga*, ia telah menunjukkan bahwa konsepsi ruang publik yang dapat dipertahankan adalah ruang publik yang bukan mengeksklusi, tetapi yang mendorong inklusi atas berbagai kepentingan dan isu-isu yang oleh ideologi maskulin borjuis telah dilabeli sebagai “privat”. Akhirnya, Fraser telah menunjukkan bahwa konsepsi yang dapat dipertahankan akan bisa berguna untuk publik kuat, yaitu publik yang mempunyai akses pada *policy making*, dan publik lemah, yaitu publik yang tidak punya akses pada *policy making*. Hubungan-hubungan di antara mereka itu, menurut Fraser, dapat diteorisasikan. Alhasil, Fraser berargumen bahwa ia menghadapi empat asumsi konstitutif konsepsi borjuis tentang ruang publik, namun pada saat yang sama, ia juga telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang sesuai dengan perkembangan baru, yaitu konsepsi pascaborjuis.



Pada level lain, argumen Fraser menganjurkan adanya empat tugas teori kritis yang saling berkorespondensi mengenai masyarakat demokrasi yang ada sekarang ini. *Pertama*, teori ini akan memberi cara-cara di mana ketimpangan sosial dibicarakan oleh publik dalam masyarakat kapitalis akhir. *Kedua*, hal itu akan menunjukkan bagaimana ketimpangan mempengaruhi hubungan antar publik dalam masyarakat kapitalis akhir, bagaimana publik secara beragam diberdayakan atau tersegmentasi, dan bagaimana ruang publik secara tidak sengaja menjadi tertutup dan tersubordinasi pada yang lain. Kemudian, teori kritis akan mengekspos cara-cara di mana pelabelan beberapa isu dan kepentingan sebagai “privat” membatasi dan membangun jarak pada problem-problem bersama, yang dapat memperluas kontestasi dalam masyarakat kontemporer. Akhirnya, teori kritis akan menunjukkan bagaimana karakter yang sebenarnya begitu lemah dari beberapa ruang publik dalam masyarakat kapitalis akhir itu, dapat menelanjangi “opini publik” serta mampu menjadi kekuatan praktik. Melalui semua cara itu, teori kritis mengekspos keterbatasan bentuk-bentuk spesifik demokrasi yang kita nikmati dalam masyarakat kapitalis kontemporer. Mungkin itu dapat membantu menginspirasi kita untuk mencoba mengurangi keterbatasan-keterbatasan tersebut, dengan terus mencoba menawarkan alternatif baru dalam upaya mendorong perubahan sosial yang emansipatoris dan partisipatoris.

#### Daftar Pustaka

- Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Diterjemahkan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Butler, Judith. 1993. *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*. London: Routledge.
- Edkins, Jenny, dan Nick Vaughan Williams. 2009. *Critical Theorists and International Relations*. Milton Park: Routledge.

- Eley, Geoff. 1987. Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century, dalam Craig Calhoun (ed), *Habermas and the Public Sphere*. Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 1780-1850
- Evans, Mary. 2009. Feminist Theory, dalam Bryan S. Turner (ed) *The New Blackwell Companion to Social Theory*. Malden: Blackwell Publishing, hlm. 390-419.
- Foucault, Michel. 1998. *Aesthetics, Method, and Epistemology*. Vol.2. New York: New Press.
- \_\_\_\_\_. 1979. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (A. Sheridan. Trans). New York: Vintage Books.
- Fraser, Nancy. 2011. Feminism, Capitalism, and the Cunning of History, dalam *Cahiers du Genre* Volume 50, Issue 1, 2011, hlm 165-192
- \_\_\_\_\_. 1998. Heterosexual Capitalism?, dalam *New Left Review* March/April: 140-149.
- \_\_\_\_\_. 1990. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, dalam *Social Text*, No. 25/26, hlm. 56-80.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Fact and Norms: Contributions to Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press.
- \_\_\_\_\_. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger, Cambridge Massachusetts: The MIT Press
- Mansbridge, Jane. 1990. Feminism and Democracy, dalam *The American Prospect*, No. 1 hlm 127
- Masters, Christina. 2009. Judith Butler, dalam Jenny Edkins, dan Nick Vaughan Williams (eds). *Critical Theorists and International Relations*. Milton Park: Routledge. hlm. 150-181.
- Marx, Karl dan Engels, F. 1984. *Origin of the Family, Private Property and the State*. London: Penguin.



- Ryan, Mary P. 1990. *Women in Public: Between Banners and Ballots*, dalam Craig Calhoun (ed), *Habermas and the Public Sphere*. Baltimore: The John Hopkins University Press, hlm. 1825-1880
- Scheurich, J. Joseph dan Kathryn B. McKenzie. 2011. Metodologi Foucault: Arkeologi dan Genealogi, dalam Denzin dan Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. 217-290. Diterjemahkan Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schickert, Christine. 2018. Feminism in Neoliberal Times: An Interview with Nancy Fraser, dalam *Global Dialogue. Magazine of the International of Sociological Association*, Volume 8, hlm. 3-8
- Simons, Margaret A. & Marybeth Timmermann. 2015. *Simone de Beauvoir: Feminist Writings*. Urbana : University of Illinois Press.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara.